



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2024**



Jalan Sunan Bonang No. 1 Telp. (0231) 321259
Fax. (0231) 323685 Sumber
E-mail info@dprd-cirebonkab.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2024, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKIP mempunyai fungsi ganda, pertama untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, kedua sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Penyusunan LKIP ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas dan transparan serta sekaligus menjadi pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon pada Tahun 2024.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada jajaran Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon yang telah memberikan karyanya untuk peningkatan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon.

Sumber, Februari 2025
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN CIREBON



ASEP PAMUNGKAS, SP., MP.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650909 199303 1 006

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan unit organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Secara garis besar LKIP berisikan informasi mengenai rencana kinerja dan capaian kinerja tahun 2024. Rencana Kerja Tahun 2024 dan Perjanjian Kinerja 2024 merupakan kinerja yang ingin dicapai selama tahun 2024 yang sepenuhnya mengacu pada Perubahan Rencana Strategis 2019-2024 Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon.

Penyusunan LKIP berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 129 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maka Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Dalam mewujudkan pelaksanaan tugas dan fungsinya, misi yang di ampuh oleh Sekretariat DPRD adalah meningkatnya produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional yang di dukung oleh peningkatan kapasitas aparatur perangkat daerah, sedangkan tujuan yang ingin dicapai yaitu meningkatkan sinergitas fasilitasi terhadap fungsi DPRD dengan dua sasaran kinerja, yaitu :

1. Sasaran kinerja pertama : Meningkatnya fasilitasi fungsi alat-alat kelengkapan DPRD.
 - Diukur dengan indikator prosentase jumlah peraturan perundangan selesai tepat waktu (jumlah peraturan perundangan yang ditetapkan dibagi jumlah peraturan perundangan yang diagendakan dikali seratus persen)
 - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 1 (satu) program, yaitu Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
 - Target capaian indikator sasaran tahun 2024 sebesar 94,00%, dan sampai dengan bulan Desember 2024 terealisasi sebesar 88,24%. Rasio realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 93,87%. (target tidak tercapai)
2. Sasaran kinerja kedua : meningkatnya kinerja, akuntabilitas dan perencanaan pada Sekretariat DPRD.
 - Diukur dengan indikator Nilai LAKIP Sekretariat DPRD (perencanaan kinerja ditambah pengukuran kinerja ditambah

pelaporan kinerja ditambah evaluasi internal dan ditambah capaian kinerja)

- Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 1 (satu) program, yaitu Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota.
- Target capaian indikator sasaran tahun 2024 sebesar 65,00 poin, dan sampai dengan bulan Desember 2024 terealisasi sebesar 72,10 poin. Rasio realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 110,92%. (target tercapai).

Sesuai dengan hasil capaian kinerja sampai tahun 2024 kami merumuskan beberapa hal penting sebagai evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui yang perlu menjadi perhatian Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon ke depan, yaitu sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi yang baik antar unit kerja di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon, antar perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Cirebon, dan optimalisasi koordinasi antara Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon dengan Lembaga DPRD Kabupaten Cirebon maupun pihak-pihak lain yang terkait untuk merumuskan kebijakan dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
2. Mengoptimalkan pengelolaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang diikuti dengan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam Renstra.
3. Melakukan evaluasi terkait ketepatan target dan capaian dari indikator kinerja setiap sub kegiatan.
4. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana, sumber daya aparatur baik secara kuantitas dan kualitas sebagai penunjang terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD

Hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai pedoman bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon dalam perbaikan kinerja pada masa yang akan datang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Cascading Kinerja dan Struktur Organisasi	1
1.2 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan	3
1.3 Isu- Isu Strategis	4
1.4 Sumber Daya Manusia, Sarana Prasarana dan Anggaran ...	5
1.5 Tindak Lanjut atas LHE LKP Tahun 2023	9
BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	10
2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja	10
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan	11
2.3 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2024	12
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	16
2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja	17
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	19
3.1 Capain Kinerja Tahun 2024	19
3.2 Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis.....	21
3.3 Efisiensi Anggaran	32
3.4 Inovasi	32
BAB IV : PENUTUP	35
4.1 Kesimpulan	35
4.2 Rencana Tindak Lanjut	35

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

1.1 Peta Jabatan Sekretariat DPRD 4

1.2 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan,
Kompetensi dan Jenis Kelamin..... 6

1.3 Sarana dan Prasarana 7

1.4 Anggaran Tahun 2024 8

1.5 Tindak Lanjut atas LHE LKIP Tahun 2023 9

2.1 Sasaran Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon 11

2.2 Strategi dan Arah Kebijakan 12

2.3 Struktur Program Kegiatan dan Sub Kegiatan terkait Pencapaian Sasaran
Tahun Anggaran 2024..... 12

2.4 Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2024 16

3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja 19

3.2 Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2024..... 20

3.3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran 1 21

3.4 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Sasaran 1 21

3.5 Capain Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan terhadap Sasaran 1 22

3.6 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran 2 25

3.7 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Sasaran 2 26

3.8 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan terhadap Sasaran 2 26

3.9 Anggaran dan Realisasi Tahun Anggaran 2024 32

DAFTAR GAMBAR

1.1 Cascading Kinera Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon 2

1.2 Struktur Organisasi Perangkat Daerah 3

2.1 Tampilan Awal SIMONEK 17

2.2 Tampilan Menu SIMONEK..... 18

3.1 Tampilan masuk aplikasi e-jadwal DPRD 33

3.2 Tampilan halaman utama aplikasi e-jadwal DPRD 33

3.3 Input jadwal kegiatan DPRD pada aplikasi e-jadwal DPRD..... 34

3.4 Hasil aplikasi e-jadwal DPRD 34

BAB I

PENDAHULUAN

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dan pertanggungjawaban dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang di ampuh oleh setiap perangkat daerah atas anggaran yang direalisasikan. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dasar hukum penyusunan LKIP meliputi :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Penyusunan laporan kinerja ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas dan transparan serta sekaligus menjadi pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon pada tahun 2024.

Adapun Tujuan dari penyusunan laporan kinerja ini adalah :

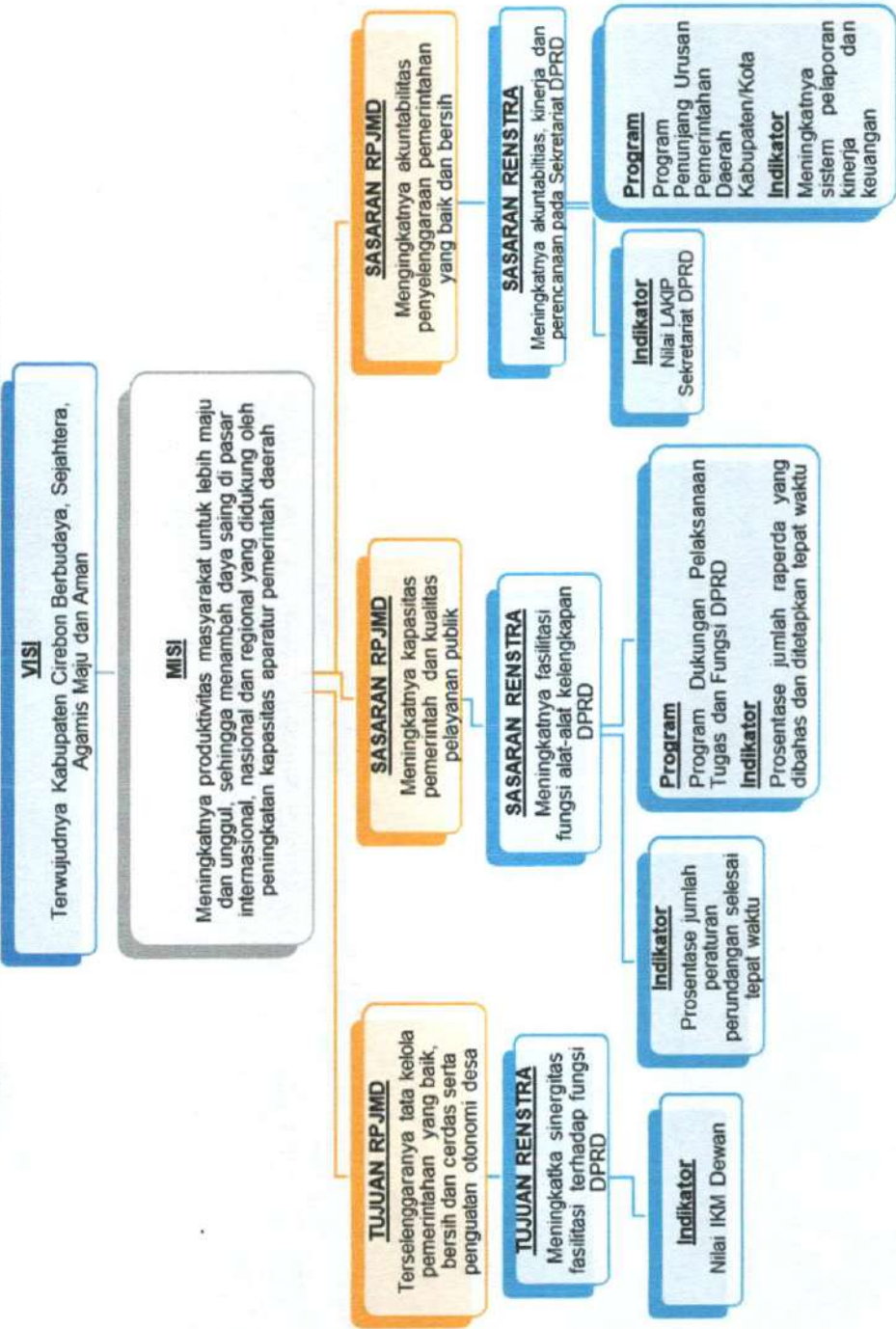
1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Memacu perbaikan kinerja secara berkesinambungan bagi unit kerja di lingkup Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon

1.1 CASCADING KINERJA DAN STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai dengan paradigma bahwa Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon dibentuk dengan tujuan untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

Berikut skema kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon

Gambar 1.1 Cascading Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon



Sebagaimana sebuah organisasi pada umumnya, struktur organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon menjelaskan sebagaimana tugas akan dibagi, dikelompokkan dan dikoordinasikan secara formal dengan ciri adanya tugas-tugas operasional rutin yang harus dicapai melalui spesialisasi peraturan dan perundang-undangan yang sangat formal, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon dan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 129 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut :

Gambar 1.2 Struktur Organisasi Perangkat Daerah



1.2 TUGAS, FUNGSI DAN PETA JABATAN

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi :

1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD Kabupaten Cirebon;
2. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD Kabupaten Cirebon; dan
4. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD Kabupaten Cirebon.

Semua pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut dibagi habis ke dalam jabatan struktural, jabatan fungsional dan pelaksana seperti tabel berikut :

Tabel 1.1 Peta Jabatan Sekretariat DPRD

Jabatan Struktural	Jabatan Fungsional dan Pelaksana
1. Sekretaris DPRD	1. Dibawah Kepala Bagian Umum dan Keuangan :
2. Kepala Bagian Umum dan Keuangan	1) Analis Keuangan Pusat dan Daerah
1) Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian	2) Perencana
3. Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan	3) Pengolah Data dan Informasi
4. Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	4) Pengadministrasi Perkantoran
5. Kepala Bagian Humas Protokol Kerja Sama dan Aspirasi	2. Dibawah Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan :
	1) Perisalah Legislatif
	2) Pengadministrasi Perkantoran
	3. Dibawah Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan :
	1) Analis Kebijakan
	2) Pengolah Data dan Informasi
	4. Dibawan Kepala Bagian Humas Protokol Kerja Sama dan Aspirasi :
	1) Pranata Hubungan Masyarakat
	2) Pengadministrasi Perkantoran
	5. Dibawah Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian :
	1) Pengadministrasi Perkantoran
	2) Operator Layanan Operasional

1.3 ISU-ISU STRATEGIS

Penentuan isu-isu strategis mutlak menjadi bagian dalam suatu proses perencanaan. Keberhasilan mengidentifikasi isu-isu strategis dengan tepat pada gilirannya akan membuat perencanaan disusun menjadi tepat sasaran, efektif, dapat diterima oleh pihak-pihak terkait, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang.

Berdasarkan hal diatas, maka dapat kami rumuskan isu strategis yang ada pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut :

- Penguatan Lembaga DPRD untuk menjawab tantangan standar kinerja DPRD melalui peningkatan kapasitas DPRD dan melalui pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Peningkatan kelengkapan sarana dan prasarana untuk memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD; dan

- Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur Sekretariat DPRD dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

1.4 SUMBER DAYA MANUSIA, SARANA PRASARANA DAN ANGGARAN

Dukungan sumber daya manusia, sarana prasarana dan anggaran dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Kompetensi dan Jenis Kelamin

No	Jabatan	Formasi				Pegawai yang ada					Jenis Kelamin		
		Jumlah	Kualifikasi			Jumlah	Kualifikasi						
			S2	S1/DIV	DIII		SMA	S2	S1	DIII	SMA	SMP	L
A.	Jabatan Pimpinan Tinggi												
	JPT Madya												
	JPT Pratama	1	1			1					1		
B.	Jabatan Administrasi												
	Administrator	4	4			4					2		2
	Pengawas	1	1			1			1				1
	Pelaksana	60	4	43	13	16	1	3		12	15		1
C.	Jabatan Fungsional	8	8			6	1	5			4		2
	Jumlah	74	18	43	13	28	7	9		12	22		6

Berdasarkan data pada tabel diatas, tingkat pendidikan sumber daya aparatur Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon relatif tinggi, jenjang pendidikan S2 sebanyak 7 orang (25,00%), jenjang pendidikan S1 sebanyak 9 orang (32,14%) dan jenjang pendidikan setara SMA sebanyak 12 orang (42,86%).

Kompoisi pegawai laki-laki lebih banyak dibanding pegawai perempuan. Komposisi pejabat struktural seimbang antara laki-laki dan perempuan dan sudah sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki oleh pejabat masing-masing. Masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 46 orang, terdiri dari 2 orang pejabat fungsional, dan 44 orang pegawai pelaksana.

SARANA DAN PRASARANA

Dalam kaitannya untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon di dukung oleh Fasilitas Penunjang (Aset Tetap dan Aset Tetap Lainnya), seperti terlihat pada tabel berikut :

Tabel 1.3 Sarana dan Prasarana

No	Klasifikasi	Jumlah Barang	Nilai Aset (Rp)
	Aset Tetap		
1	Alat Besar	13 Unit	383.059.544,84
2	Alat Angkutan	19 Unit	5.163.842.293,00
3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	6 Unit	33.900.000,00
4	Alat Kantor dan Rumah Tangga	2.330 Unit	12.204.284.498,28
5	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	75 Unit	1.115.087.811,92
6	Alat Kedokteran dan Kesehatan	1 Unit	2.000.000,00
7	Alat Laboratorium	6 Unit	30.000.000,00
8	Komputer	537 Unit	4.329.870.678,94
9	Rambu-Rambu	2 Unit	3.400.000,00
10	Peralatan Olah Raga	10 Unit	66.255.637,00
	Aset Tetap Lainnya		
1	Bahan Perpustakaan	1.102 Unit	562.361.750,00
2	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olah Raga	11 Unit	9.900.000,00
	Jumlah		10.584.589.903.78

Kendaraan dinas terdiri dari 5 (lima) unit kendaraan dinas jabatan dan 6 (enam) unit kendaraan operasional. Kebutuhan ruangan kantor secara umum relatif sudah tersedia yang meliputi ruang rapat kerja paripurna DPRD, ruang rapat kerja DPRD, ruang kerja masing-masing unit kerja, ruang arsip, musholla, ruang perpustakaan, ruang gudang, ruang tunggu, dan toilet.

Adapun peralatan dan perlengkapan kantor berupa meja kerja, kursi kerja, lemari penyimpanan, pendingin ruangan relatif sudah tersedia dalam kondisi baik.

ANGGARAN

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon pada tahun 2024, Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon mendapatkan alokasi anggaran seperti terlihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 1.4 Anggaran Tahun 2024

Kode Rekening			Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahn (Rp)	Bertambah / (Berkurang) (Rp)
4			PENDAPATAN DAERAH	0,00	0,00	0,00
5			BELANJA DAERAH	96.188.417.800,00	98.001.217.000,00	1.812.799.200,00
5	1		BELANJA OPERASI	94.636.744.800,00	96.007.461.000,00	1.370.716.200,00
5	1	01	Belanja Pegawai	52.814.390.800,00	53.629.152.800,00	814.762.000,00
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	41.822.354.000,00	42.378.308.200,00	555.954.200,00
5	2		BELANJA MODAL	1.551.673.000,00	1.993.756.000,00	442.083.000,00
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.551.673.000,00	1.528.756.000,00	(22.917.000,00)
5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	465.000.000,00	465.000.000,00
			Jumlah Belanja	96.188.417.800,00	98.001.217.000,00	1.812.799.200,00
			Total Surplus / (Defisit)	(96.188.417.800,00)	(98.001.217.000,00)	(1.812.799.200,00)
6			PEMBIAYAAN DAERAH	0,00	0,00	0,00

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon berasal dari APBD Kabupaten Cirebon seperti terlihat pada tabel diatas, untuk Tahun 2024 alokasi anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon semula Rp96.188.417.800,00 dan mengalami perubahan menjadi Rp98.001.217.000,00 atau bertambah sebesar Rp1.812.799.200,00

Alokasi anggaran tersebut terbagi ke dalam belanja operasi sebesar Rp96.007.461.000,00 yang didalamnya meliputi belanja pegawai sebesar

Rp53.629.152.800,00 dan belanja barang dan jasa sebesar Rp42.378.308.200,00, dan juga terdapat alokasi anggaran untuk belanja modal sebesar Rp1.993.756.000,00 yang didalamnya meliputi belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp1.528.756.000,00 dan belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp465.000.000,00. Alokasi anggaran tersebut diperuntukkan guna mendukung pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang berkaitan langsung dengan pencapaian indikator sasaran strategis maupun program-program pendukung, yang didukung oleh 2 (dua) program, 15 (lima belas) kegiatan, dan 48 (empat puluh delapan) sub kegiatan.

1.5 TINDAK LANJUT ATAS LHE LKIP TAHUN 2023

Berikut ini merupakan tindak lanjut atas catatan hasil reviu atas evaluasi laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon berdasarkan surat Inspektorat Kabupaten Cirebon Nomor 800.1.11.1/675-Sekr tanggal 15 Februari 2024.

Tabel 1.5 Tindak Lanjut Evaluasi LKIP Tahun 2023

No.	Komponen Penilaian	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1.	Perencanaan Kinerja	-	-
2.	Pengukuran Kinerja	Monev Triwulan 1, 2, 3 dan 4 yang ditandatangani setiap pimpinan unit kerja/bidang	Unit kerja Sekretariat DPRD telah melakukan upaya dengan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan
3.	Pelaporan Kinerja	-	-
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Setiap unit kerja/bidang melaksanakan/membuat Laporan Pengukuran Kinerja Triwulan, kemudian dilakukan rekapitulasi dan disampaikan kepada Pimpinan Perangkat Daerah	Sekretariat DPRD telah melakukan penyusunan laporan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengukuran kinerja

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon, dan dalam kerangka pembangunan *good governance*, serta ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*), maka perlu dilakukan Perencanaan Strategis.

Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana strategis perangkat daerah merupakan turunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Perubahan Renstra Tahun 2019-2024 menjadi landasan dalam penyusunan dan menetapkan rencana kerja tahunan dan perjanjian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon Tahun 2023.

2.1 TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA

Dengan Visi ***“Terwujudnya Kabupaten Cirebon Berbudaya, Sejahtera, Agamis, Maju Dan Aman”*** sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Cirebon 2019–2024, terdapat misi yang diemban oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yaitu :

1. Mewujudkan Masyarakat yang menjunjung tinggi dan melestarikan nilai-nilai Budaya, Tradisi dan Adat Istiadat;
2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan ekonomi;
3. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai-nilai agama, budi pekerti, santun dan beretika;
4. Meningkatkan produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul, sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah;
5. Memelihara keamanan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka Sekretariat DPRD mengampuh misi ***“Meningkatnya produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul, sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah”***.

Berdasarkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Cirebon, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon menetapkan tujuan ***“Meningkatkan Sinergitas Fasilitas terhadap Fungsi DPRD”***, dengan indikator tujuan ***“Nilai IKM Dewan”***

Sasaran Pemerintah Daerah yang diampuh oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon adalah :

1. Meningkatnya kapasitas pemerintah dan kualitas pelayanan publik
2. Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih

Sasaran yang ingin dicapai Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon adalah:

1. Meningkatnya fasilitasi fungsi Alat-alat kelengkapan DPRD
2. Meningkatnya kinerja, akuntabilitas dan perencanaan pada Sekretariat DPRD

Rumusan Tujuan, Sasaran dan Indikator

Tujuan	Sasaran	Indikator
Meningkatkan sinergitas fasilitasi terhadap fungsi DPRD	Meningkatnya fasilitasi fungsi Alat-alat kelengkapan DPRD	Prosentase jumlah peraturan perundangan selesai tepat waktu
	Meningkatnya kinerja, akuntabilitas dan perencanaan pada Sekretariat DPRD	Nilai LAKIP Sekretariat DPRD

Tabel 2.1 Sasaran Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan					Target Akhir Renstra
				2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Meningkatnya fasilitasi fungsi Alat-alat kelengkapan DPRD	Prosentase jumlah peraturan perundangan selesai tepat waktu	Prosen	90,00	91,00	93,00	93,00	94,00	94,00
2.	Meningkatnya kinerja, akuntabilitas dan perencanaan pada Sekretariat DPRD	Nilai LAKIP Sekretariat DPRD	Poin	63,00	63,50	64,00	64,50	65,00	65,00

2.2 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Setelah menentukan tujuan dan sasaran perangkat daerah, hal selanjutnya yang perlu dilakukan adalah menentukan stragegi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan strategi tersebut seperti tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 2.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya fasilitasi fungsi Alat-alat kelengkapan DPRD	Optimalisasi fasilitasi fungsi alat-alat kelengkapan DPRD	Peningkatan tata kelola fasilitasi terhadap DPRD
Meningkatnya kinerja, akuntabilitas dan perencanaan pada Sekretariat DPRD	Peningkatan capaian kinerja, akuntabilitas keuangan dan perencanaan anggaran yang berbasis data yang akurat	Pengembangan sistem pelaporan kinerja dan pelaporan akuntabilitas keuangan

2.3 STRUKTUR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024

Struktur program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon Tahun 2024 maupun program, kegiatan dan sub kegiatan pendukung dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3 Struktur Program Kegiatan dan Sub Kegiatan terkait Pencapaian Sasaran Tahun 2024

Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / (Berkurang) (Rp)
Meningkatnya fasilitasi fungsi Alat-alat kelengkapan DPRD	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	31.565.292.800,00	31.603.454.900,00	38.162.100,00
	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	5.327.152.200,00	5.705.671.200,00	378.519.000,00
	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	4.046.734.000,00	4.346.506.200,00	299.772.200,00
	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	1.280.418.200,00	1.359.165.000,00	78.746.800,00
	Pembahasan Kebijakan Anggaran	1.318.862.700,00	1.372.862.700,00	54.000.000,00
	Pembahasan KUA dan PPAS	462.673.400,00	462.673.400,00	0,00
	Pembahasan APBD	407.655.600,00	461.655.600,00	54.000.000,00
	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	448.533.700,00	461.655.600,00	0,00
	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	6.575.912.300,00	7.485.949.900,00	910.037.600,00
	Pengawasan Pemerintahan dan Hukum	1.437.046.800,00	1.685.862.600,00	248.815.800,00
	Pengawasan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	1.494.813.700,00	1.758.588.700,00	263.775.000,00

Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / (Berkurang) (Rp)
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	1.483.122.800,00	1.745.817.800,00	262.695.000,00
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	1.468.621.800,00	1.670.873.600,00	202.251.800,00
	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	692.307.200,00	1.670.873.600,00	(67.500.000,00)
	Peningkatan Kapasitas DPRD	8.724.060.700,00	9.282.139.200,00	558.078.500,00
	Pendalaman Tugas DPRD	3.051.257.600,00	3.050.206.100,00	(1.051.500,00)
	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	4.027.105.100,00	4.059.589.600,00	32.484.500,00
	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	1.314.000.000,00	1.154.000.000,00	(160.000.000,00)
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	305.690.200,00	992.335.700,00	686.645.500,00
	Penyusunan Program Kerja DPRD	26.007.800,00	26.007.800,00	0,00
	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	6.387.388.100,00	4.425.003.100,00	(1.962.385.000,00)
	Penyusunan Pokok- Pokok Pikiran DPRD	108.925.800,00	108.925.800,00	0,00
	Pelaksanaan Reses	6.278.462.300,00	4.316.077.300,00	(1.962.385.000,00)
	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	385.769.200,00	485.681.600,00	99.912.400,00
	Pengawasan Kode Etik DPRD	385.769.200,00	485.681.600,00	99.912.400,00
	Fasilitasi Tugas DPRD	2.846.147.600,00	2.846.147.200,00	(400,00)
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	1.163.273.000,00	1.163.272.600,00	(400,00)
	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	1.682.874.600,00	1.682.874.600,00	0,00
Total anggaran yang berkaitan langsung dengan sasaran		31.565.292.800,00	31.603.454.900,00	38.162.100,00
Meningkatnya kinerja, akuntabilitas dan perencanaan pada Sekretariat DPRD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	64.623.125.000,00	66.397.762.100,00	1.774.637.100,00

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / (Berkurang) (Rp)
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	559.037.600,00	558.722.600,00	(315.000,00)
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	36.684.000,00	36.369.000,00	(315.000,00)
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	22.677.000,00	22.677.000,00	0,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	499.676.600,00	499.676.600,00	0,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.628.470.800,00	5.048.475.800,00	420.005.000,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.601.507.800,00	5.021.512.800,00	420.005.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	16.073.000,00	16.073.000,00	0,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	10.890.000,00	10.890.000,00	0,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.032.419.200,00	1.083.379.200,00	50.960.000,00
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	36.225.000,00	87.185.000,00	50.960.000,00
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	996.194.200,00	996.194.200,00	0,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.440.718.100,00	3.561.271.100,00	120.553.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	81.433.400,00	94.403.400,00	12.970.000,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.643.919.400,00	1.734.282.400,00	90.363.000,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	27.189.900,00	44.409.900,00	17.220.000,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	787.600.000,00	787.600.000,00	0,00

Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / (Berkurang) (Rp)
	Penyediaan Barang dan Cetakan dan Penggandaan	385.780.600,00	385.780.600,00	0,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	110.862.900,00	110.862.900,00	0,00
	Penyediaan Bahan/Material	68.751.500,00	68.751.500,00	0,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	335.180.400,00	335.180.400,00	0,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.829.053.100,00	1.829.053.100,00	0,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	575.269.100,00	575.269.100,00	0,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.253.784.000,00	1.253.784.000,00	0,00
	Pemeliharaan Barang Daerah Milik Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.428.652.700,00	2.893.652.700,00	465.000.000,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	318.288.000,00	318.288.000,00	0,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	167.039.000,00	167.039.000,00	0,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	194.628.000,00	194.628.000,00	0,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.123.769.700,00 ,00	1.437.769.700,00	314.000.000,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	624.928.000,00	775.928.000,00	151.000.000,00
	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	49.039.283.000,00	49.434.040.000,00	394.757.000,00
	Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD	48.212.883.000,00	48.607.640.000,00	394.757.000,00

Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / (Berkurang) (Rp)
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	728.700.000,00	728.700.000,00	0,00
	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	97.700.000,00	97.700.000,00	0,00
	Layanan Administrasi DPRD	1.665.490.500,00	1.989.167.600,00	323.677.100,00
	Fasilitasi Fraksi DPRD	672.936.300,00	672.936.300,00	0,00
	Fasilitasi Rapat dan Konsultasi DPRD	992.554.200,00	1.316.231.300,00	323.677.100,00
Total anggaran yang berkaitan langsung dengan sasaran		64.623.125.000,00	66.397.762.100,00	1.774.637.100,00

2.4 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Pada Tahun 2024 Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon menetapkan Perjanjian Kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2024

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya fasilitasi fungsi alat-alat kelengkapan DPRD	Prosentase jumlah peraturan perundangan selesai tepat waktu	94,00 Prosen
2.	Meningkatnya kinerja, akuntabilitas, dan perencanaan pada Sekretariat DPRD	Nilai LAKIP Sekretariat DPRD	65,00 Poin

Untuk mencapai sasaran strategis seperti tabel diatas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut :

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Program Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	31.565.292.800,00	APBD Kabupaten Cirebon
2.	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	64.623.125.00000	APBD Kabupaten Cirebon

Pada tahun 2024, Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon melaksanakan perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, perubahan dilakukan karena adanya perubahan anggaran dan telah ditetapkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2024.

Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

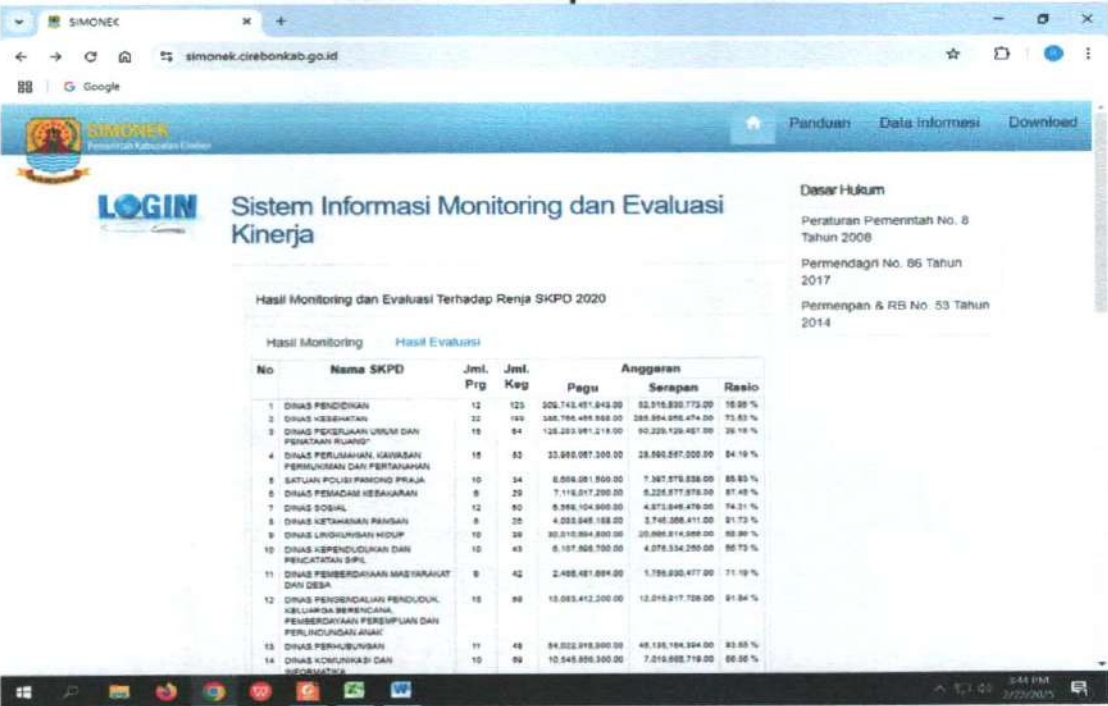
NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya fasilitasi fungsi alat-alat kelengkapan DPRD	Prosentase jumlah peraturan perundangan selesai tepat waktu	94,00 Prosen
2.	Meningkatnya kinerja, akuntabilitas, dan perencanaan pada Sekretariat DPRD	Nilai LAKIP Sekretariat DPRD	65,00 Poin

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Program Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	31.603.454.900	APBD Kabupaten Cirebon
2.	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	66.397.762.100	APBD Kabupaten Cirebon

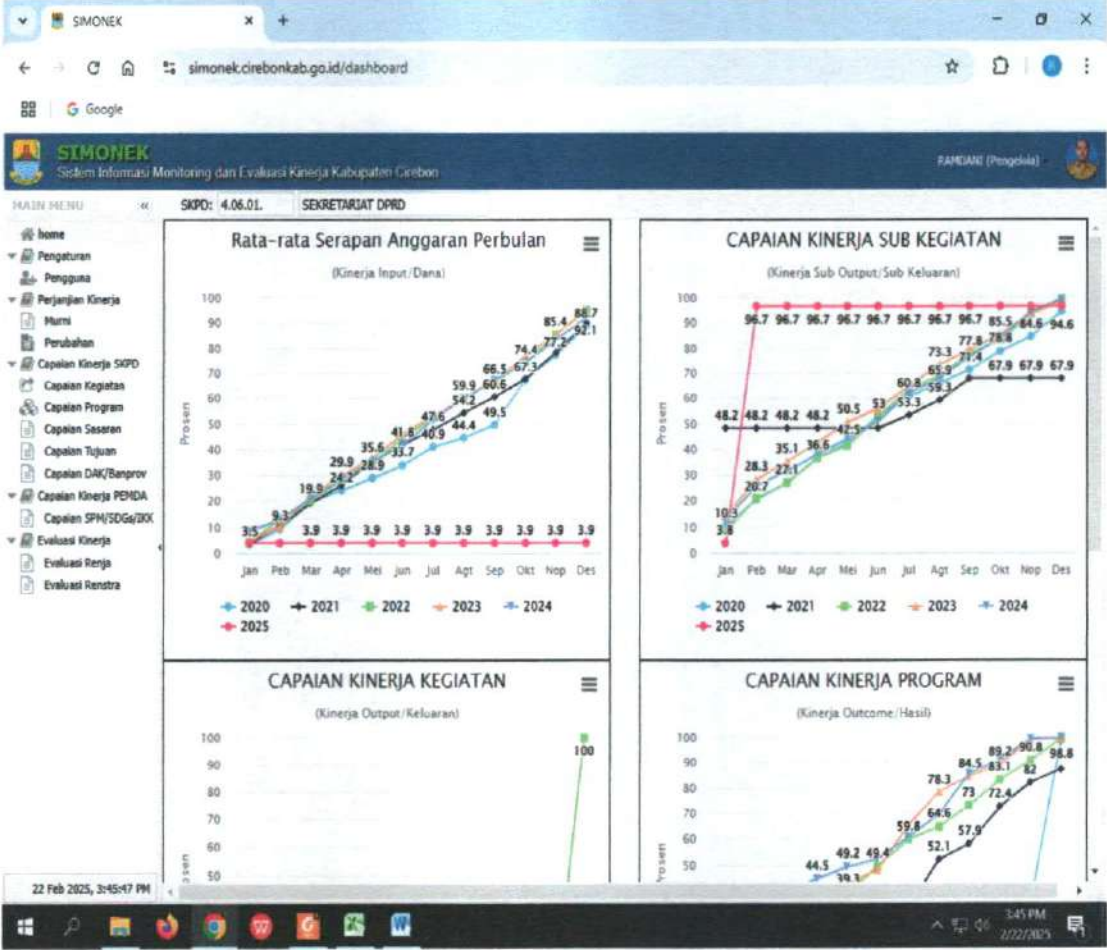
2.5 INSTRUMEN PENDUKUNG CAPAIAN KINERJA

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mencapai sasaran strategis dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon termasuk Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon menggunakan instrumen pendukung, seperti penggunaan aplikasi Sistem Informasi Monitorng dan Evaluasi Kinerja (SIMONEK : simonek.cirebonkab.go.id) yang mengintegrasikan anggaran perangkat daerah, realisasi anggaran dan capaian kinerjanya. Aplikasi ini juga berfungsi untuk memonitoring dan mengevaluasi capaian kinerja untuk setiap sub kegiatan, capaian kinerja program, dan capaian kinerja perangkat daerah yang bisa dilakukan per bulan atau per triwulan.

Gambar 2.1 Tampilan Awal SIMONEK



Gambar 2.2 Tampilan Menu SIMONEK



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon sebagai salah satu instansi di Pemerintah Kabupaten Cirebon yang tugas pokoknya adalah sebagai pendukung terhadap kegiatan DPRD yang secara teknis operasional langsung berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara teknis administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dituntut untuk secara terus menerus memperbaiki kinerjanya.

Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian Sasaran. Pencapaian Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Sasaran.

Media pengukuran kinerja adalah Lampiran Pengukuran Kinerja (PK), Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis. Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran diberlakukan penggunaan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu :

- 100 ke atas = Target Tercapai
- Di bawah 100 = Target Tidak Tercapai.

Tabel 3.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	91 ≤ 100	Sangat baik
2.	76 ≤ 90	Tinggi
3.	66 ≤ 75	Sedang
4.	51 ≤ 65	Rendah
5.	≤ 50	Sangat rendah

3.1 CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024

Pada Tahun 2024, telah ditetapkan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Dalam perjanjian kinerja tersebut juga ditetapkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilakukan pada tahun 2024 untuk mencapai kinerja dimaksud. Capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon Tahun 2024 merupakan tolok ukur keberhasilan dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2024 berdasarkan pada pencapaian indikator kinerja yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Sekretariat DPRD dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Sasaran Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon Tahun 2024 adalah, sebagai berikut :

- 1. Meningkatnya fasilitasi fungsi alat-alat kelengkapan DPRD
- 2. Meningkatnya kinerja, akuntabilitas dan perencanaan pada Sekretariat DPRD

Capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2024

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KRITERIA
1.	Meningkatnya fasilitasi fungsi alat-alat kelengkapan DPRD	Prosentase jumlah peraturan perundangan selesai tepat waktu	94,00 Prosen	88,24 Prosen	93,87	Sangat Baik
2.	Meningkatnya kinerja, akuntabilitas, dan perencanaan pada Sekretariat DPRD	Nilai LAKIP Sekretariat DPRD	65,00 Poin	72,10 Poin	110,92	Sangat Baik

Target indikator Prosentase jumlah peraturan perundangan selesai tepat waktu dihitung berdasarkan Jumlah peraturan perundangan yang ditetapkan dibagi jumlah peraturan perundangan yang diagendakan dikali 100 Persen. Capaian dari indikator kinerja tersebut sebesar 93,87 Persen, hal ini dikarenakan adanya peraturan perundangan yang masih dalam tahap pembahasan Panitia khusus DPRD (Pansus DPRD) dan belum mencapai kata sepakat untuk dilanjutkan ke tahap persetujuan raperda. Raperda dimaksud diantaranya Raperda tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, Raperda tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, Raperda tentang Pengarusutamaan Gender..

Adapun realisasi indikator Nilai LAKIP Sekretariat DPRD sebesar 72,10 poin dari target yang telah ditetapkan sebesar 65,00 poin. Penilaian indikator tersebut dihitung berdasarkan :

- 1. Perencanaan Kinerja (30%)
- 2. Pengukuran Kinerja (25%)
- 3. Pelaporan Kinerja (15%)
- 4. Evaluasi Internal (10%) dan
- 5. Capaian Kinerja (20%)

Dari hasil penilaian unsur-unsur tersebut, indikator Nilai LAKIP Sekretariat DPRD mendapatkan capaian sebesar 110,92 Persen.

3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS

Analisis capaian kinerja sasaran strategis diuraikan sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya fasilitasi fungsi alat-alat kelengkapan DPRD

Kinerja sasaran Meningkatnya fasilitasi fungsi alat-alat kelengkapan DPRD diukur dengan indikator dan meta indikator sebagai berikut :

Tabel 3.3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan
Sasaran 1

No.	Sasaran	Indikator	Meta Indiaktor
1.	Meningkatnya fasilitasi fungsi alat-alat kelengkapan DPRD	Prosentase jumlah peraturan perundangan selesai tepat waktu	Jumlah peraturan perundangan yang ditetapkan dibagi jumlah peraturan perundangan yang diagendakan dikali 100 Persen

Kinerja sasaran meningkatnya fasilitasi fungsi alat-alat kelengkapan DPRD diukur dengan menggunakan meta indikator Jumlah peraturan perundangan yang ditetapkan dibagi jumlah peraturan perundangan yang diagendakan dikali 100 Persen. Sumber data diolah dari hasil rapat paripurna DPRD berupa persetujuan rancangan perda, keputusan DPRD dan keputusan Pimpinan DPRD.

Tabel 3.4 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Sasaran 1

No.	Indikator Sasaran	Realisasi 2023	Tahun 2024			Target Akhir Renstra (2024)
			Target	Realisasi	% Realisasi	
1.	Prosentase jumlah peraturan perundangan selesai tepat waktu	85,29%	94,00%	88,24%	93,87%	94,00%

Analisis ketercapaian sasaran 1 : Meningkatnya fasilitasi fungsi alat-alat kelengkapan DPRD adalah sebagai berikut :

- a. Tercapai 88,24%, dengan demikian persentase realisasi terhadap target sebesar 93,87% (Target tidak tercapai)
- b. Pada tahun 2023 realisasinya mencapai 85,29%, dengan demikian pada tahun 2024 mengalami peningkatan capaian realisasi sebesar 2,95%

Keberhasilan peningkatan capaian sasaran 1, Meningkatnya fasilitasi fungsi alat-alat kelengkapan DPRD didukung oleh keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.5 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan terhadap Sasaran 1

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realiasi	% Capaian
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Prosentase jumlah raperda yang dibahas dan ditetapkan tepat waktu	94%	94%	100%
Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	1 BA	1 BA	100%
Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang Undangan	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
Pembahasan Kebijakan Anggaran	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran	1 BA	1 BA	100%
Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	1 BA	1 BA	100%

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realiasi	% Capaian
Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	12 Laporan	12 Laporan	100%
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	12 Laporan	12 Laporan	100%
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	12 Laporan	12 Laporan	100%
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	12 Laporan	12 Laporan	100%
Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
Peningkatan Kapasitas DPRD	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	1 BA	1 BA	100%
Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	300 Dokumen	300 Dokumen	100%
Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	396 Dokumen	396 Dokumen	100%
Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	25 Orang	23 Orang	92%
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	20 Dokumen	20 Dokumen	100%

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realiasi	% Capaian
Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	1 BA	1 BA	100%
Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	150 Dokumen	150 Dokumen	100%
Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	1 BA	1 BA	100%
Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	12 Laporan	12 Laporan	100%
Fasilitasi Tugas DPRD	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD	1 BA	1 BA	100%
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	24 Dokumen	24 Dokumen	100%

Capaian tersebut didukung dari :

a. Capaian Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Indikator Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yaitu Prosentase jumlah raperda yang dibahas dan ditetapkan tepat waktu. Target capaian pada tahun 2024 yaitu sebesar 94%, sedangkan realisasi sebesar 94% atau tercapai 100% dari target.

Faktor Pendorong Keberhasilan :

- a. Substansi raperda yang masih bersifat umum;
- b. Tahapan penyusunan dan dokumen yang dipersyaratkan dalam pembahasan raperda sudah lengkap;
- c. Pemahaman materi raperda oleh Panitia Khusus (Pansus) dan Pemerintah Daerah yang bisa dipahami secara menyeluruh; dan
- d. Adanya Komitmen bersama tentang batas waktu penyelesaian pembahasan raperda.

Faktor Penghambat Pencapaian :

- a. Pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang waktunya bersamaan;
- b. Jadwal penyelesaian pembahasan raperda yang tidak disepakati di awal pembahasan; dan
- c. Dari sudut regulasi, sering dihadapkan pada ketidakjelasan dan ketidakpastian aturan, sehingga menimbulkan pemahaman yang berbeda, hal ini dikarenakan terjadinya perubahan peraturan perundang-undangan, yang belum dilengkapi dengan petunjuk teknisnya.

Sasaran 2 : Meningkatnya kinerja, akuntabilitas dan perencanaan pada Sekretariat DPRD

Kinerja sasaran Meningkatnya kinerja, akuntabilitas dan perencanaan pada Sekretariat DPRD diukur dengan indikator dan meta indikator sebagai berikut :

**Tabel 3.6 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan
Sasaran 2**

No.	Sasaran	Indikator	Meta Indiaktor
1.	Meningkatnya kinerja, akuntabilitas dan perencanaan pada Sekretariat DPRD	Nilai LAKIP Sekretariat DPRD	Perencanaan kinerja + Pengukuran Kinerja + Pelaporan Kinerja + Evaluasi Internal + Capaian Kinerja

Kinerja sasaran meningkatnya kinerja, akuntabilitas dan perencanaan pada Sekretariat DPRD diukur dengan menggunakan meta indikator perencanaan kinerja ditambah pengukuran kinerja ditambah pelaporan kinerja ditambah evaluasi internal ditambah capaian kinerja. Sumber data diolah dari catatan hasil reviu atas laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Tabel 3.7 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Sasaran 2

No.	Indikator Sasaran	Realisasi 2023	Tahun 2024			Target Akhir Renstra (2024)
			Target	Realisasi	% Realisasi	
1.	Nilai LAKIP Sekretariat DPRD	70,00 Poin	65,00 Poin	72,10 Poin	110,92%	65,00 Poin

Analisis ketercapaian sasaran 2 : Nilai LAKIP Sekretariat DPRD adalah sebagai berikut :

- a. Tercapai 72,10 poin, dengan demikian persentase realisasi terhadap target sebesar 110,92% (Target tercapai)
- b. Pada tahun 2023 realisasinya mencapai 70,00 poin, dengan demikian pada tahun 2024 mengalami peningkatan capaian realisasi sebesar 2,10 poin.

Keberhasilan peningkatan capaian sasaran 2, Nilai LAKIP Sekretariat DPRD didukung oleh keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.8 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan terhadap Sasaran 2

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realiasi	% Capaian
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	96%	96%	100%
	Prosentase meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	96%	96%	100%
	Prosentase Pegawai yang hadir sesuai dengan jam kerja dan berpakaian sesuai dengan ketentuan	96%	96%	100%
	Meningkatnya kapasitas SDM aparatur terhadap peningkatan kinerja pelayanan SKPD	96%	96%	100%
	Meningkatnya sistem pelaporan kinerja dan keuangan yang transparan, akuntabel dan informatif	100%	100%	100%

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realiasi	% Capaian
	Meningkatnya fungsi dokumen perencanaan sebagai acuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD	100%	100%	100%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 BA	1 BA	100%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan	100%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 BA	1 BA	100%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang /Bulan	30 Orang /Bulan	100%

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realiasi	% Capaian
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme steran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 BA	1 BA	100%
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	100%
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	10 Orang	10 Orang	100%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 BA	1 BA	100%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	11 Paket	11 Paket	100%

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realiasi	% Capaian
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	20 Paket	100%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	100%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8000 Paket	8000 Paket	100%
Penyediaan Barang dan Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	20 Paket	20 Paket	100%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	8 Dokumen	8 Dokumen	100%
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	38 Paket	38 Paket	100%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	30 Laporan	100%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 BA	1 BA	100%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	100%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	18 Laporan	18 Laporan	100%

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realiasi	% Capaian
Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	50 Orang /Bulan	50 Orang /Bulan	100%
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	100%
Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	50 Orang	47 Orang	94,00%
Layanan Administrasi DPRD	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Layanan Administrasi DPRD	1 BA	1 BA	100%
Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	84 Laporan	84 Laporan	100%
Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	38 Laporan	38 Laporan	100%

Capaian tersebut didukung dari :

a. Capaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yaitu Nilai LAKIP Sekretariat DPRD. Target capaian pada tahun 2024 yaitu sebesar 65,00 poin, sedangkan realisasi sebesar 72,10 poin atau tercapai 110,92% dari target.

Faktor Pendorong Keberhasilan :

- a. Adanya komitmen dari seluruh pegawai Sekretariat DPRD untuk meningkatkan kinerja.

Faktor Penghambat Pencapaian :

- a. Belum optimalnya dukungan sarana dan prasarana dalam menunjang kinerja; dan
- b. Belum optimalnya koordinasi antar unit kerja dan lembaga DPRD.
- c. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya untuk memfasilitasi tugas, fungsi dan wewenang DPRD yang bekerja dalam tatanan politis, terkadang harus berhadapan dengan kendala administrasi.

3.3 EFISIENSI ANGGARAN

Alokasi dan realisasi anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024 dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.9 Anggaran dan Realisasi Tahun Anggaran 2024

Sasaran Kinerja Indikator	Anggaran Target Satuan	Realisasi Kinerja	Rasio (%)	Efisiensi
Meningkatnya fasilitasi fungsi alat-alat kelengkapan DPRD	31.603.454.900	27.562.419.462	87,21	4.041.035.438
Prosentase jumlah peraturan perundangan selesai tepat waktu	94,00 Persen	88,24 Persen	93,87	
Meningkatnya kinerja, akuntabilitas dan perencanaan pada Sekretariat DPRD	66.397.762.100	62.744.782.018	94,50	3.652.980.082
Nilai LAKIP Sekretariat DPRD	65.00 Poin	72,10	110,92	
Total Belanja	98.001.217.000	90.307.201.480		7.694.015.520

Anggaran yang digunakan untuk pembiayaan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran tersebut seluruhnya dari APBD Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024. Analisis efisiensi pada pelaporan ini dihitung berdasarkan capaian kinerja yang mencapai 100 persen atau melebihi 100 persen dengan realisasi anggaran kurang dari 100 persen.

Berdasarkan tabel diatas, capaian kinerja pada sasaran meningkatnya kinerja, akuntabilitas dan perencanaan pada Sekretariat DPRD dengan indikator Nilai LAKIP Sekretariat DPRD telah melampaui target kinerja tahun 2024 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.62.744.782.018 dari target anggaran sebesar Rp.66.397.762.100 atau 94,50% sehingga dapat dikatakan penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja telah efisien.

Terdapat efisiensi sebesar Rp.3.652.980.082 atau 5,50% yang bersumber dari :

- Sisa pengadaan barang dan jasa;
- Efisiensi belanja bimbingan teknis;
- Efisiensi belanja makanan dan minuman;
- Efisiensi belanja perjalanan dinas; dan
- Efisiensi belanja lembur.

3.4 INOVASI

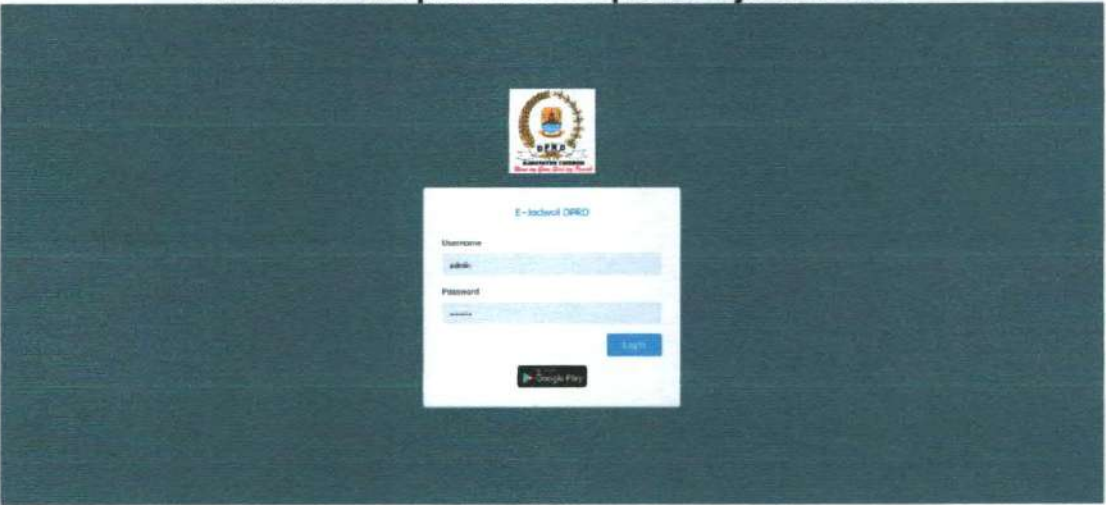
Inovasi memiliki arti sebagai penemuan atau sesuatu yang baru, yang berbeda dari yang sudah ada. Inovasi dapat berwujud dalam berbagai bentuk, seperti ide/gagasan, metode atau alat. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, disebutkan bahwa Inovasi daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Inovasi daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan prinsip efisien, efektif, perbaikan kualitas

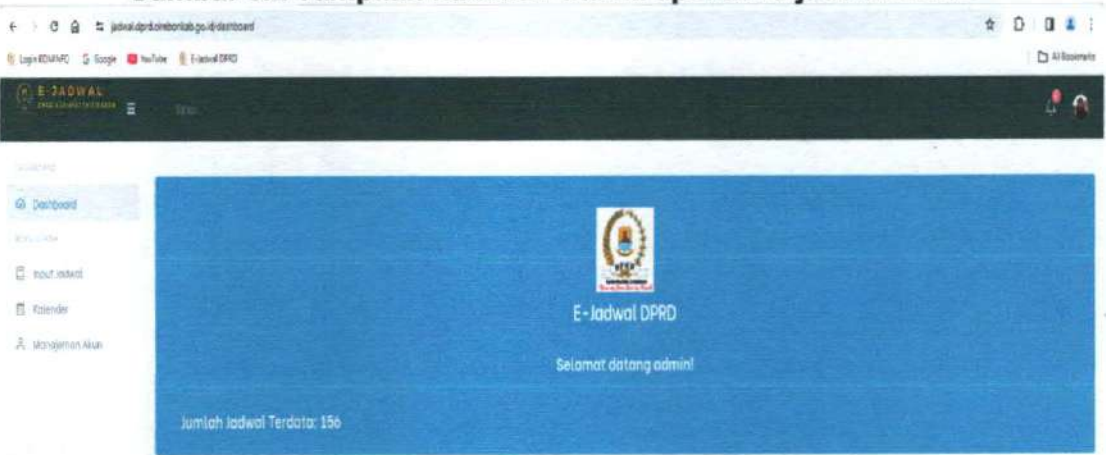
pelayanan, tidak menimbulkan konflik kepentingan, berorientasi kepada kepentingan umum, dilakukan secara terbuka, memenuhi nilai kepatutan dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

e-jadwal DPRD merupakan sarana aplikasi untuk penyusunan jadwal dan agenda kegiatan DPRD. Dengan ini diharapkan dapat menjadi sarana yang efektif bagi anggota DPRD dalam menyusun jadwal dan agenda kegiatan DPRD.

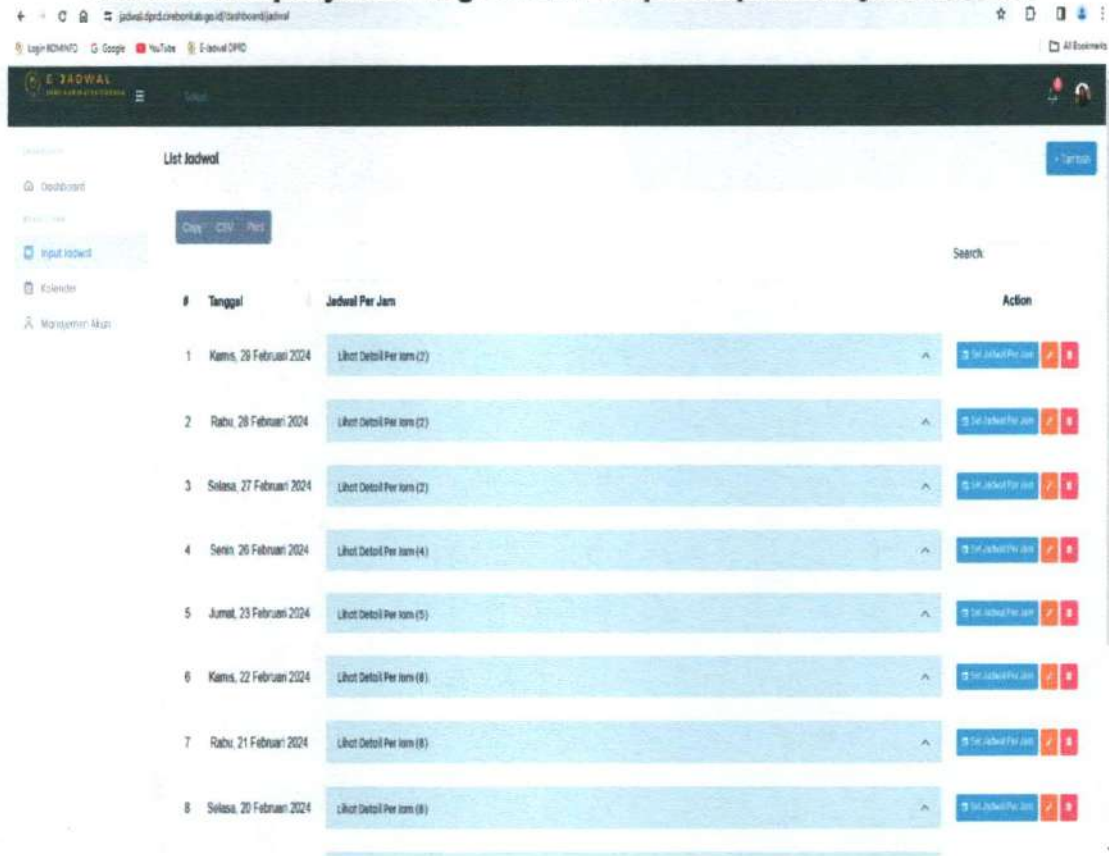
Gambar 3.1 Tampilan masuk aplikasi e-jadwal DPRD



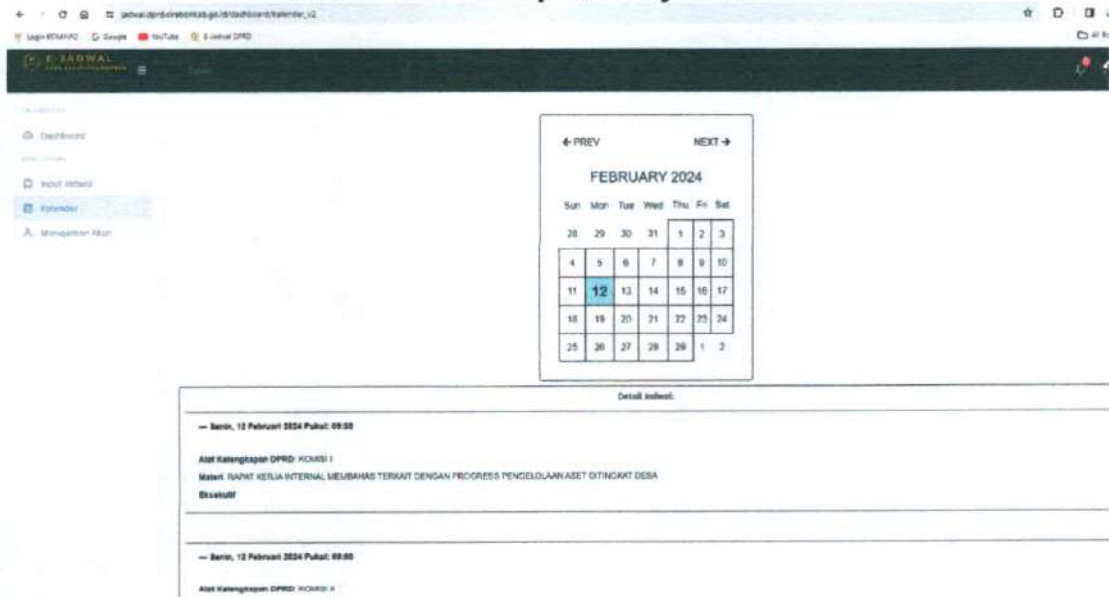
Gambar 3.2 Tampilan halaman utama aplikasi e-jadwal DPRD



Gambar 3.3 Input jadwal kegiatan DPRD pada aplikasi e-jadwal DPRD



Gambar 3.4 Hasil aplikasi e-jadwal DPRD



BAB IV P E N U T U P

4.1 KESIMPULAN

Hasil laporan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut :

Faktor penghambat dalam pencapaian sasaran :

1. Pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang waktunya bersamaan;
2. Jadwal penyelesaian pembahasan raperda yang tidak disepakati di awal pembahasan;
3. Belum optimalnya dukungan sarana dan prasarana dalam menunjang kinerja; dan
4. Belum optimalnya koordinasi antar unit kerja dan lembaga DPRD.

Faktor pendorong dalam pencapaian sasaran :

1. Substansi raperda yang masih bersifat umum;
2. Tahapan penyusunan dan dokumen yang dipersyaratkan dalam pembahasan raperda sudah lengkap;
3. Pemahaman materi raperda oleh panitia khusus (pansus) dan pemerintah daerah dipahami secara menyeluruh
4. Adanya komitmen bersama tentang batas waktu penyelesaian pembahasan raperda; dan
5. Adanya komitmen dari seluruh pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon untuk meningkatkan kinerja.

4.2 RENCANA TINDAK LANJUT

Rencana tindak lanjut yang dilakukan Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon dalam upaya meningkatkan kinerja dan mengarahkan pada tujuan dan sasaran organisasi adalah :

1. Peningkatan dan optimalisasi sarana dan prasarana penunjang kinerja;
2. Optimalisasi koordinasi antar unt kerja dan Lembaga DPRD;
3. Perlunya penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Menghadapi kendala administrasi dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD yang bernuansa politis, Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon berupaya memberikan pemahaman yang logis dan rasional, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
5. Dalam menghadapi kekurangan sumber daya aparatur dengan kompetensi khusus, Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon mengusulkan permintaan pegawai sesuai dengan kriteria yang diperlukan.

LAMPIRAN - LAMPIRAN

BERITA ACARA TINDAKLANJUT HASIL REVIU LAKIP
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Pada hari ini Kamis tanggal 11/07/2024, telah dilaksanakan tindaklanjut hasil reviu LAKIP tahun 2023, dengan hasil sebagai berikut :

Nama Perangkat Daerah : Sekretariat DPRD

Jumlah Temuan : 2

NO	REKOMENDASI TEMUAN	TINDAKLANJUT OPD	PENYELESAIAN		DOKUMEN PENDUKUNG	
			SELESAI	BELUM SELESAI	ADA	TIDAK ADA
1	PE'RENCANAN KINERJA					
2	PE'NGUKURAN KINERJA					
	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internat pada unit belum dilaksanakan kerja/perangkat daerah.	Laporan Pelaksanaan kegiatan	selesai		terlampir PDF	
3	PE'LAPORAN KINERJA					
	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL					
5	Setiap unit kerja / bidang melaksanakan / membuat Laporan Pengukuran Kinerja Triwulan, kemudian dilakukan rekapitulasi dan disampaikan kepada Pimpinan Perangkat Daerah	Laporan Monitoring Evaluasi kinerja	selesai		Terlampir PDF	

a.n. TIM TINDAKLANJUT



Randani
NIP. 1975080720001010

Sumber, 11-7-2024

PERANGKAT DAERAH



Arion Cakya Pradi
NIP. 19790419200011007

Catatan :

Bukti Tindaklanjut diarsipkan oleh tim tindaklanjut dalam bentuk softcopy



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Sunan Bonang No. 01 Sumber 45611 Telp. (0231) 321259 Fax. 323865 Exs. 124

E-mail : info@dprd-cirebonkab.go.id

S U M B E R

Kode Pos 45611

LAPORAN DAN MONITORING EVALUASI KINERJA PER TRIWULAN
BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2023

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dan pertanggungjawaban dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang di ampuh oleh setiap perangkat daerah atas anggaran yang direalisasikan. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Penyusunan laporan kinerja ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas dan transparan serta sekaligus menjadi pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon pada Triwulan IV Tahun 2023.

Tujuan dari penyusunan laporan kinerja ini adalah :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Memacu perbaikan kinerja secara berkesinambungan bagi unit kerja di lingkup Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon

Capaian kinerja organisasi merupakan tolok ukur keberhasilan dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan, yang didasarkan pada indikator kinerja yang telah ditetapkan. Perbandingan antara kinerja yang dicapai dengan kinerja yang diharapkan atau direncanakan merupakan salah satu bentuk pengukuran kinerja.

Sasaran Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon Tahun 2023 adalah, sebagai berikut :

1. Meningkatnya fasilitasi fungsi alat-alat kelengkapan DPRD
2. Meningkatnya kinerja, akuntabilitas dan perencanaan pada Sekretariat DPRD

Capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel Capaian Kinerja Bagian Umum dan Keuangan
Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon Triwulan IV Tahun 2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Meningkatnya fasilitasi fungsi alat-alat kelengkapan DPRD	Prosentase jumlah peraturan perundangan selesai tepat waktu	93,00 Prosen	85,29	91,71
2.	Meningkatnya kinerja, akuntabilitas, dan perencanaan pada Sekretariat DPRD	Nilai LAKIP Sekretariat DPRD	64,50 Poin	70,00	108,53

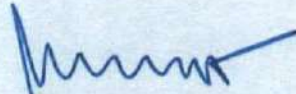
Target indikator Prosentase jumlah peraturan perundangan selesai tepat waktu dihitung berdasarkan Jumlah peraturan perundangan yang ditetapkan dibagi jumlah peraturan perundangan yang diagendakan dikali 100 Persen. Capaian dari indikator kinerja tersebut sebesar 91,71 Persen, hal ini dikarenakan adanya peraturan perundangan yang masih dalam tahap pembahasan Panitia khusus DPRD (Pansus DPRD) dan belum mencapai kata sepakat untuk dilanjutkan ke tahap persetujuan raperda. Raperda dimaksud diantaranya Raperda tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah, Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon, Raperda tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, Raperda tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Cirebon dan Raperda tentang Perlindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

Adapun realisasi indikator Nilai LAKIP Sekretariat DPRD sebesar 70,00 poin dari target yang telah ditetapkan sebesar 64,50 poin. Penilaian indikator tersebut dihitung berdasarkan :

1. Perencanaan Kinerja (30%)
2. Pengukuran Kinerja (25%)
3. Pelaporan Kinerja (15%)
4. Evaluasi Internal (10%) dan
5. Capaian Kinerja (20%)

Dari hasil penilaian unsur-unsur tersebut, indikator Nilai LAKIP Sekretariat DPRD mendapatkan capaian sebesar 108,53%.

Kepala Bagian Umum dan Keuangan
Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon



WAWAN SISWANDAR, SE., M.Si.
NIP. 19740605 199503 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Sunan Bonang No. 01 Sumber 45611 Telp. (0231) 321259 Fax. 323865 Exs. 124

E-mail : info@dprd-cirebonkab.go.id

S U M B E R

Kode Pos 45611

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Rapat : Laporan Pengukuran Kinerja Triwulan
Hari/Tanggal : Rabu / Desember 2023
Waktu Rapat : 09.00 WIB - Selesai
Tempat : Ruang Rapat Sekretariat DPRD
Acara : 1. Pembukaan
2. Pembahasan/Evaluasi
3. Penutupan

Peserta Rapat :

Peserta Rapat terdiri dari Pegawai Sekretariat DPRD, yang terdiri dari :

1. Sekretaris DPRD
2. Kepala Bagian
3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
4. Fungsional

Kegiatan Rapat :

A. Pembukaan

Rapat dibuka oleh Sekretaris DPRD mulai pukul 09.00 WIB bertempat di ruang rapat Sekretariat DPRD dengan materi Pembahasan Laporan Pengukuran Kinerja Per Triwulan per Unit Kerja.

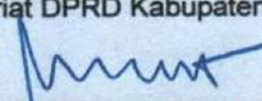
B. Pembahasan

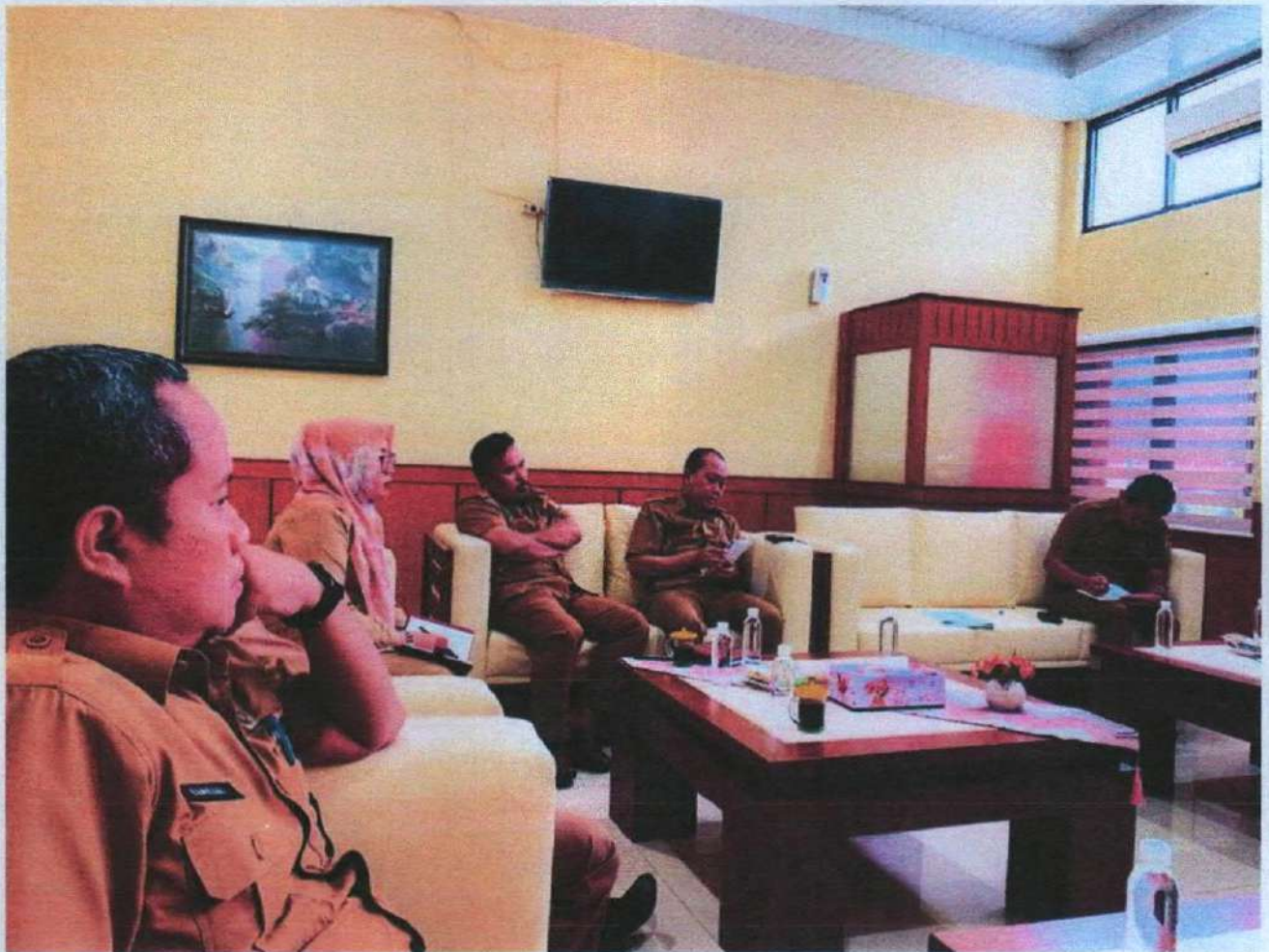
- a. Membahas Evaluasi dan Realisasi Capaian Kinerja yang telah dilaksanakan untuk setiap program, kegiatan dan sub kegiatan dan perbandingan antara target dan realisasi yang dicapai disesuaikan dengan target dan waktu pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan.:
 1. Untuk Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan 6 (enam) indikator kinerja yang diampuh oleh 9 (sembilan) kegiatan dan 29 (dua puluh sembilan) sub kegiatan dengan realisasi kinerja 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp63.390.746.177,00 atau 97,51%.
 2. Untuk Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dengan 1 (satu) indikator kinerja yang diampuh oleh 1 (satu) program, 7 (tujuh) kegiatan dan 21 (dua puluh satu) sub kegiatan dengan realisasi kinerja 98,92% dan realisasi anggaran sebesar Rp26.582.905.503,00 atau 88,92%.
- b. Sebagai tindak lanjut dari rapat pembahasan dan evaluasi tentang capaian realisasi anggaran dan capaian kinerja Tahun 2023 diharapkan untuk tahun berikutnya bisa dilaksanakan sesuai dengan target dan rencana sehingga capaian realisasi anggaran dan realisasi capaian kinerja bisa lebih baik dan meningkat.

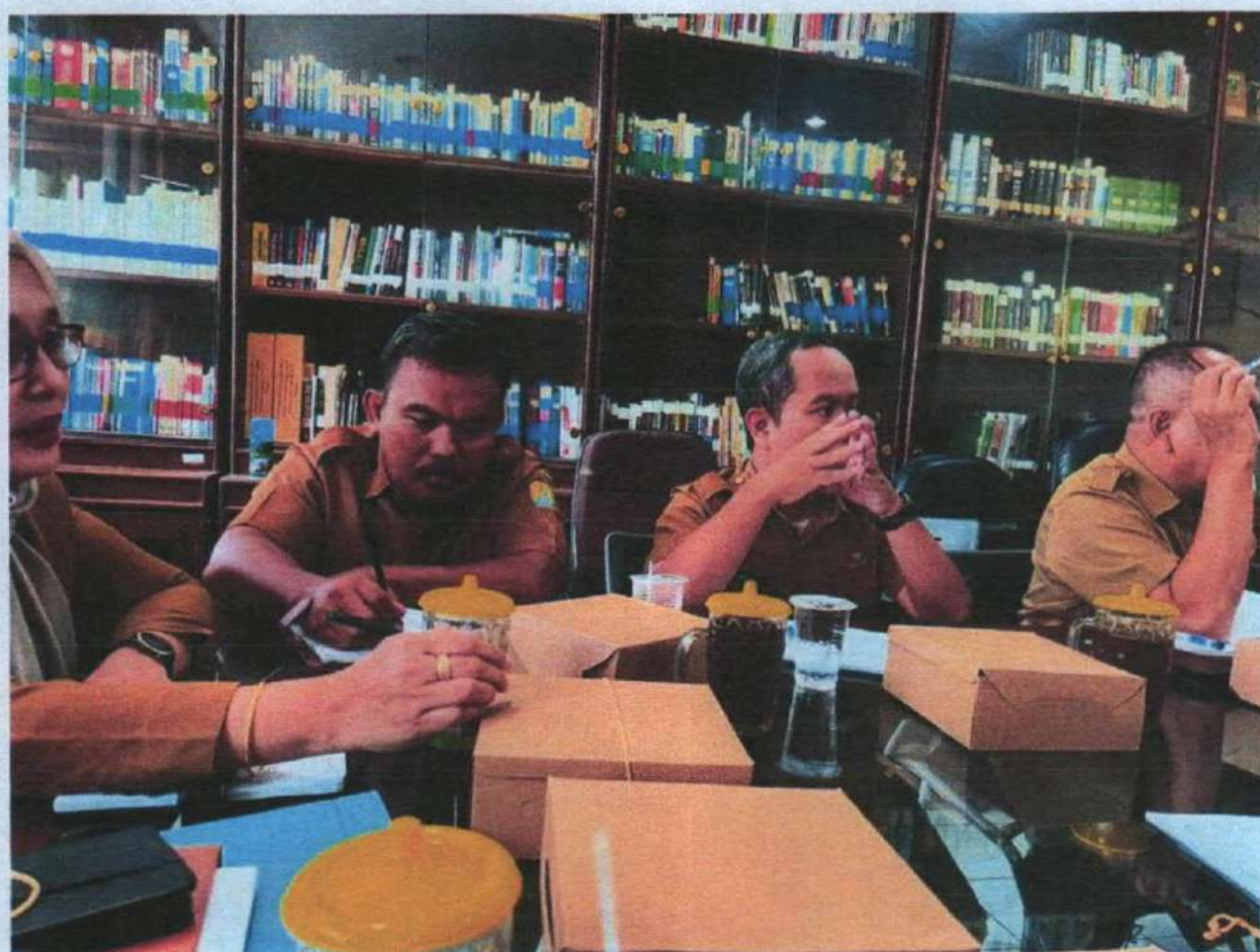
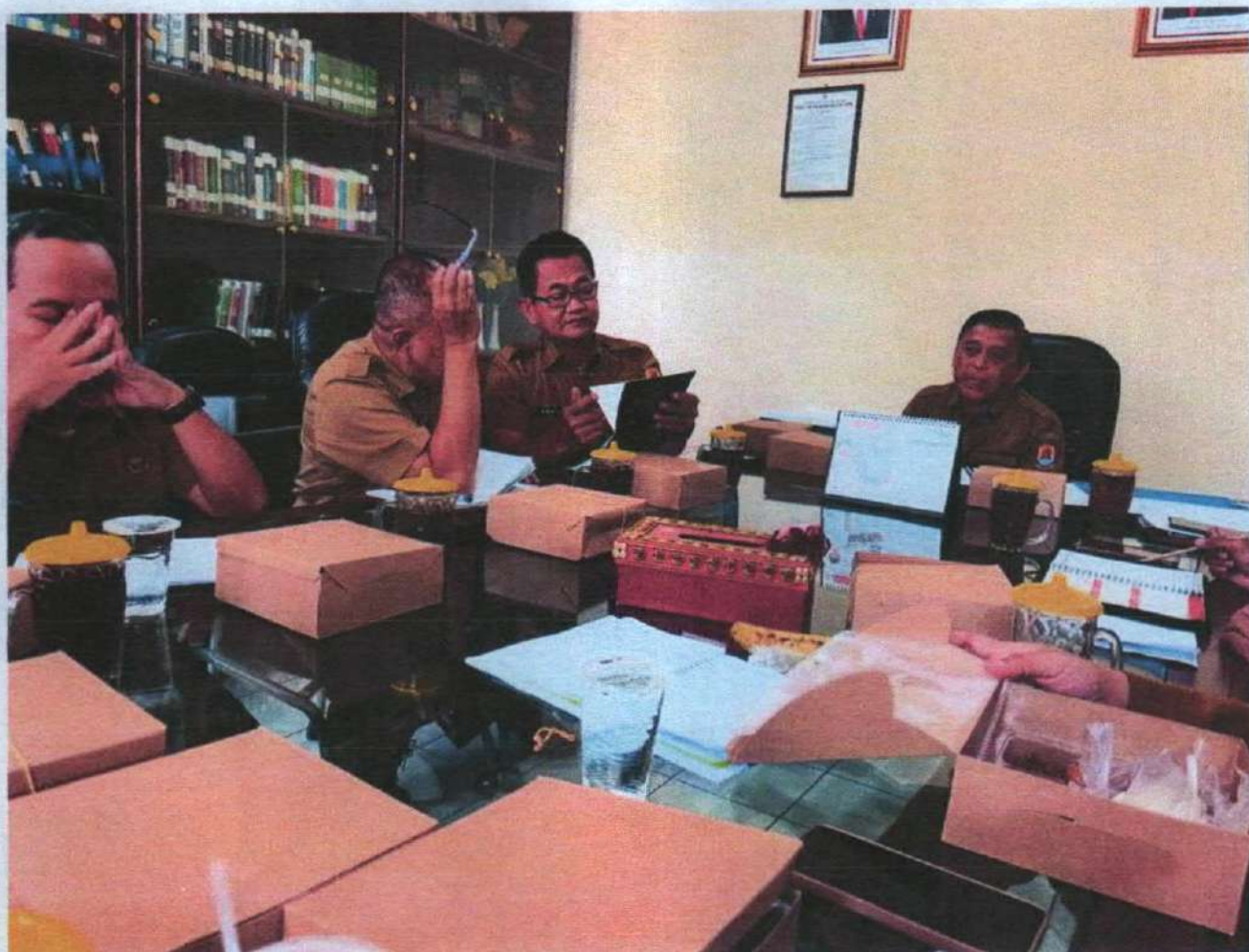
C. Penutupan

Rapat ditutup oleh Sekretaris DPRD dengan mengucapkan Hamdalah secara bersama-sama dengan harapan kegiatan dapat berjalan dengan lancar dan dipenuhi keberkahan.

Kepala Bagian Umum dan Keuangan
Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon


WAWAN SISWANDARI, SE., M.Si.
NIP. 19740605 199503 1 003







PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Sunan Bonang No. 01 Sumber 45611 Telp. (0231) 321259 Fax. 323865 Eks. 124
E-mail : info@dprd-cirebonkab.go.id

Kode Pos 45611

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

NOMOR : 900/Setwan-47/2024

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERUBAHAN PADA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)
KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2024**

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN CIREBON

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon;
- b. bahwa Penetapan IKU harus sejalan dengan sasaran strategis yang hendak dicapai dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon (RPJMD) Tahun 2019-2024 dan Perubahan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Cirebon.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) junto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.Pan/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon;
13. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 129 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 129 Tahun 2023);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERUBAHAN PADA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024**

- KESATU** : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Selanjutnya Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan acuan yang digunakan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan.
- KETIGA** : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja disampaikan kepada Bupati Cirebon melalui bidang-bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 18 Oktober 2024

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN CIREBON


ASEP PAMUNGKAS

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 900/Setwan- 47 /2024

TANGGAL : 18 OKTOBER 2024

TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERUBAHAN PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERUBAHAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2024

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS/ PERHITUNGAN	JENIS DATA (Tahun 2023)	Target Kinerja
1	2	3	4	5
1.	Prosentase Jumlah Peraturan Perundangan selesai tepat waktu	(Jumlah Peraturan Perundangan yang ditetapkan / Jumlah Peraturan Perundangan yang diagendakan) x 100%	Laporan Hasil Rapat DPRD	94.00 Prosen
2.	Nilai LAKIP Sekretariat DPRD	Perencanaan Kinerja (30%) + Pengukuran Kinerja (25%) + Pelaporan Kinerja (15%) + Evaluasi Internal (10%) + Capaian Kinerja (20%) = 100 %	Laporan Kinerja, Akuntabilitas dan Dokumen Perencanaan pada Sekretariat DPRD	65.00 Poin

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN CIREBON


ASEP PAMUNGKAS, SP., MP.

Pembina Utama Muda
NIP. 19650909 199303 1 006



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
SEKRETARIAT DPRD**

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ASEP PAMUNGKAS, SP, MP.
Jabatan : Sekretaris DPRD

Selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**

Nama : WAHYU MIJAYA
Jabatan : Pj. BUPATI CIREBON

Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

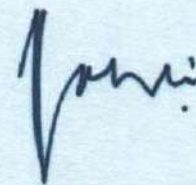
Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sumber, Oktober 2024

Pihak Kesatu,

 Pihak Kedua,



ASEP PAMUNGKAS, SP, MP.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650909 199303 1 006

 **WAHYU MIJAYA**

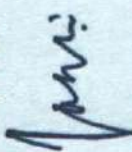


LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
SEKRETARIAT DPRD
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Impact / Dampak)	Perhitungan			Sumber Data	Target Kinerja	
			Rumus	Tipe	Target		Sebelum	Sesudah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4.1.	MENINGKATKAN SINERGITAS FASILITASI TERHADAP FUNGSI DPRD	Nilai IKM Dewan	$SKM = \frac{\text{Total dari nilai Persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Perimbangan SKM Unit Pelayanan} \times 25$	Non Kumulatif	Meningkat	Sekretariat DPRD	76.85 Poin	76.85 Poin
4.1.01.	Meningkatnya fasilitasi fungsi Alat-alat kelengkapan DPRD	Prosentase Jumlah Peraturan Perundangan selesai tepat waktu	(Jumlah Peraturan Perundangan yang ditetapkan / Jumlah Peraturan Perundangan yang diagendakan) x 100%	Non Kumulatif	Meningkat	Sekretariat DPRD	94 Prosen	94 Prosen
4.1.02.	Meningkatnya kinerja, akuntabilitas dan perencanaan pada Sekretariat DPRD	Nilai LAKIP Sekretariat DPRD	Perencanaan Kinerja (30%) + Pengukuran Kinerja (25%) + Pelaporan Kinerja (15%) + Evaluasi Internal (10%) + Capaian Kinerja (20%) = 100 %	Non Kumulatif	Meningkat	Sekretariat DPRD	65 Poin	65 Poin

No	Program	Anggaran		Keterangan
		Sebelum	Sesudah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.1.01.02.	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	31.565.292.800,00	31.603.454.900,00	Sumber Dana: DTU-DAU, Pjk MBLB, Rj Umum
4.1.02.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	64.623.125.000,00	66.397.762.100,00	Sumber Dana: DTU-DAU, PAD
	J U M L A H	96.188.417.800,00	98.001.217.000,00	

 Pj. BUPATI CIREBON
 WAHYU MIJAYA

Sumber, Oktober 2024
Pihak Kesatu
Sekretaris DPRD,

ASEP PAMUNGKAS, SP, MP.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650909 199303 1 006

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA
TAHUN ANGGARAN 2024

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH : SEKRETARIAT DPRD
SASARAN STRATEGIS : KESATU

SASARAN STRATEGIS					INDIKATOR KINERJA				TARGET				
MENINGKATKAN FASILITASI FUNGSI ALAT-ALAT KELENGKAPAN DPRD					PROSENTASE JUMLAH PERATURAN PERUNDANGAN SELESAI TEPAT WAKTU								
NO	AKSI / STRATEGI	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT / KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (,) DAN TARGET			
		TW I	TW II	TW III	TW IV					TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Meningkatkan Fasilitas dalam Pelaksanaan Kegiatan-Kegiatan yang Menunjang Fungsi Alat Kelengkapan Dewan (AKD)	✓	✓	✓	✓	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD				6.393.696.325	9.518.704.875	12.974.221.825	2.678.669.775
							Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD			579.097.300	1.460.882.200	3.180.773.300	106.399.400
					Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah			Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah		399.969.900	1.027.463.600	2.543.544.700	75.755.800
					Jumlah Dokumen Kajian Perundang Undangan			Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan		179.127.400	433.418.600	637.228.600	30.643.600
							Pembahasan Kebijakan Anggaran			30.498.000	395.526.650	840.338.050	52.500.000
					Jumla Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS			Pembahasan KUA dan PPAS		9.966.000	9.966.000	432.775.400	9.966.000
					Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD			Pembahasan APBD		9.966.000	9.966.000	355.755.600	31.968.000
					Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD			Pembahasan Pertanggungjawaban APBD		10.566.000	375.594.650	51.807.050	10.566.000
							Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan			1.034.367.700	1.805.278.200	2.167.565.100	1.568.701.300

NO	AKSI / STRATEGI	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT / KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (.) DAN TARGET			
		TW I	TW II	TW III	TW IV					TW I	TW II	TW III	TW IV
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum			Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	198.184.100	332.319.000	516.983.000	389.560.700
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	205.014.000	346.408.900	542.652.200	400.738.600
						Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	202.177.800	339.777.200	539.433.200	401.734.600
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	190.357.400	333.100.300	568.496.700	376.667.400
						Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah			Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	238.634.400	453.672.800	0,00	0,00
								Peningkatan Kapasitas DPRD		1.946.972.825	2.452.184.525	3.872.465.225	452.438.125
						Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD			Pendalaman Tugas DPRD	838.310.000	838.310.000	1.374.637.600	0,00
						Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan			Publikasi dan Dokumentasi Dewan	701.792.725	1.214.499.525	1.845.949.725	264.863.125
						Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli			Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	328.500.000	328.500.000	547.500.000	109.500.000
						Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat			Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	78.370.100	70.875.000	78.370.100	78.075.000

NO	AKSI / STRATEGI	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT / KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (.) DAN TARGET			
		TW I	TW II	TW III	TW IV					TW I	TW II	TW III	TW IV
						Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Penyusunan Program Kerja DPRD	2.084.276.200	2.139.144.400	26.007.800	192.047.950
						Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang DisusunJumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun			Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	19.945.700	53.894.500	18.727.550	16.358.050
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses			Pelaksanaan Reses	2.084.330.500	2.085.249.900	1.953.192.000	175.689.900
								Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD		72.772.000	175.381.600	123.234.800	14.380.800
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD			Pengawasan Kode Etik DPRD	72.772.000	175.381.600	123.234.800	14.380.800
								Fasilitasi Tugas DPRD		645.712.300	1.090.307.300	817.925.800	292.202.200
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	215.477.500	535.333.700	364.253.500	48.208.300
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD			Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	430.234.800	554.973.600	453.672.300	243.993.900
J U M L A H										6.393.696.325	9.518.704.875	12.974.221.825	2.678.669.775

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA
TAHUN ANGGARAN 2024

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH : SEKRETARIAT DPRD
SASARAN STRATEGIS : KEDUA

SASARAN STRATEGIS					INDIKATOR KINERJA			TARGET						
MENINGKATNYA KINERJA, AKUNTABILITAS DAN PERENCANAAN PADA SEKRETARIAT DPRD					NILAI LAKIP SEKRETARIAT DPRD									
NO	AKSI / STRATEGI	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT / KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN () DAN TARGET				
		TW I	TW II	TW III	TW IV						TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan Mengedepankan Disiplin Aparatur dan Tertib Administrasi	√	√	√	√		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				29.861.401.550	2.778.868.750	30.336.106.250	1.646.748.450
								Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			161.813.900	141.413.700	120.460.800	135.349.200
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		35.754.000	-	-	930.000
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		-	8.838.000	-	13.839.000
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		126.059.900	132.575.700	120.460.800	120.580.200

NO	AKSI / STRATEGI	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT / KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (,) DAN TARGET			
		TW I	TW II	TW III	TW IV					TW I	TW II	TW III	TW IV
							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.316.826.900	-	2.311.643.900	-
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		2.300.753.900	-	2.300.753.900	-
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		16.073.000	-	-	-
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD		-	-	10.890.000	-
							Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			441.735.000	337.378.000	101.752.000	151.554.200
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		-	-	36.225.000	-
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		441.735.000	337.378.000	65.527.000	151.554.200
							Administrasi Umum Perangkat Daerah			901.479.900	702.346.100	1.360.325.100	476.567.000

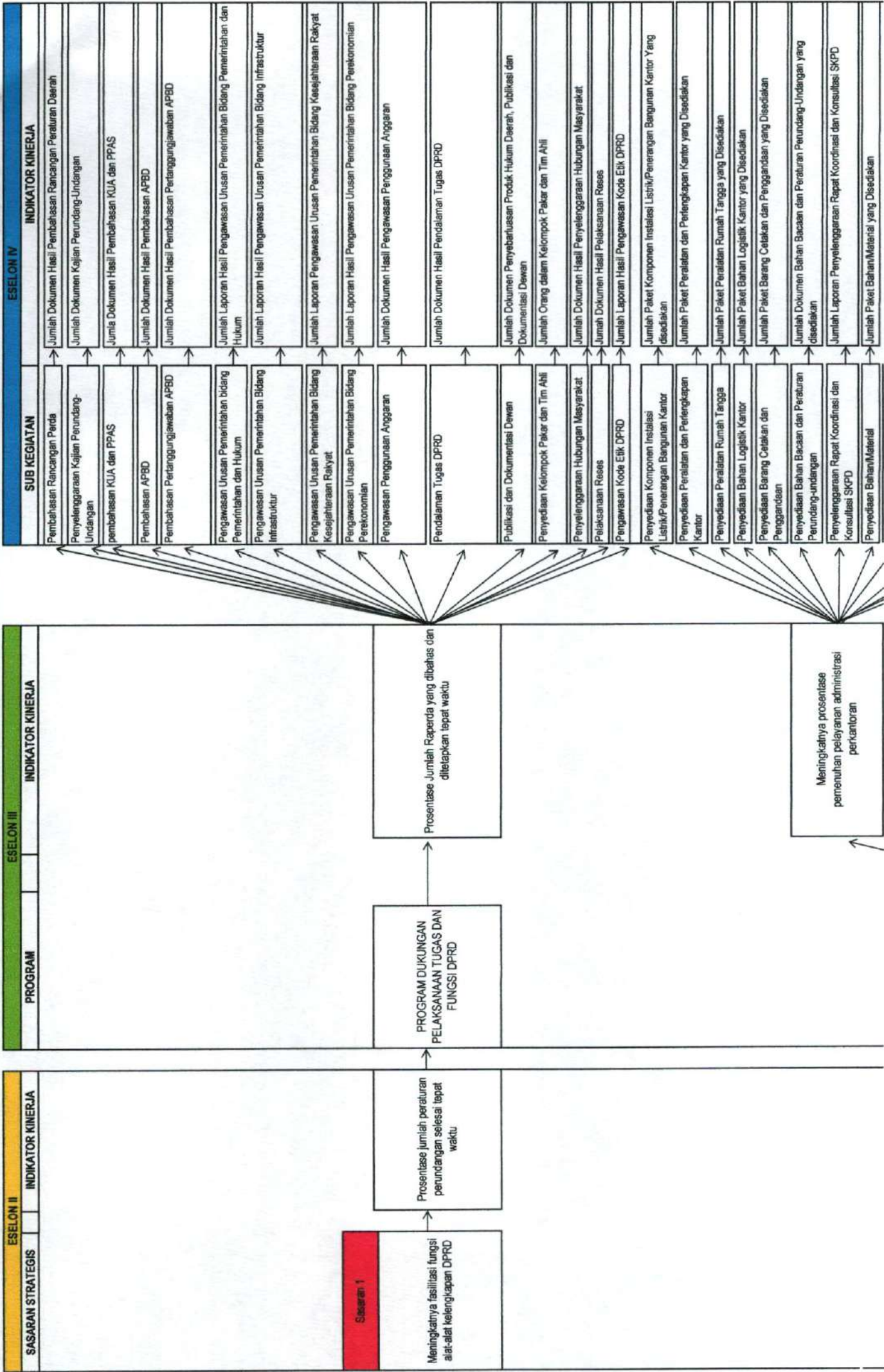
NO	AKSI / STRATEGI	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT / KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (.) DAN TARGET			
		TW I	TW II	TW III	TW IV					TW I	TW II	TW III	TW IV
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	199.770.000	143.817.000	143.817.000	87.865.100
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	313.446.000	313.446.000	407.000.000	219.892.000
								Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		685.522.800	722.970.200	794.516.800	225.642.900
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	84.400.400	85.086.800	84.400.400	64.400.400
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Pertzinannya			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	20.256.000	126.851.000	9.966.000	9.966.000
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	48.530.500	59.968.500	48.530.500	37.598.500
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	316.139.900	350.639.900	368.087.900	88.902.000

NO	AKSI / STRATEGI	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT / KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (.) DAN TARGET			
		TW I	TW II	TW III	TW IV					TW I	TW II	TW III	TW IV
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.012.100	20.012.100	20.012.100	21.397.100
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	461.550.400	301.155.000	733.653.000	147.561.000
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.386.800	8.881.200	10.338.900	5.583.000
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	196.620.000	196.620.000	196.620.000	197.740.000
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	85.623.900	39.403.900	228.958.700	31.794.100
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.912.000	18.150.100	60.888.800	15.912.000
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan			Penyediaan Bahan/Material	21.477.900	20.227.000	11.956.800	15.089.800
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	97.896.800	97.896.800	97.896.800	41.490.000
								Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		513.216.000	457.263.000	550.817.000	307.757.100

NO	AKSI / STRATEGI	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT / KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (.) DAN TARGET			
		TW I	TW II	TW III	TW IV					TW I	TW II	TW III	TW IV
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	216.196.000	100.424.000	283.532.000	24.776.000
								Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		24.393.141.500	104.000.000	24.542.141.500	-
						Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD			Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD	24.106.441.500	-	24.106.441.500	-
						Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan			Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	286.700.000	104.000.000	338.000.000	-
						Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD			Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	-	-	97.700.000	-
								Layanan Administrasi DPRD		447.665.550	313.497.750	554.449.150	349.878.050
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD			Fasilitasi Fraksi DPRD	167.712.000	170.039.600	167.712.000	167.472.700
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD			Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	279.953.550	143.458.150	386.737.150	182.405.350
						J U M L A H				29.861.401.550	2.778.868.750	30.336.106.250	1.646.748.450



POHON KINERJA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN CIREBON



ESELON II		ESELON III		ESELON IV	
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang dibayarkan
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan
				Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD
				Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Fraksi DPRD
				Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi
				Pengadaan Pakaiain Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaiain Dinas beserta Atribut Kelengkapan
				Penyediaan Pakaiain Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaiain Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Sasaran 2	Meningkatnya kinerja, akuntabilitas dan perencanaan pada Sekretariat DPRD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LAKIP Sekretariat DPRD		
			Prosentase meningkatnya sarana dan prasarana aparatur		
			Prosentase Pegawai yang hadir sesuai dengan jam kerja dan berpakaian sesuai dengan ketentuan		
			Meningkatnya kapasitas SDM aparatur terhadap peningkatan kinerja pelayanan SKPD		
			Meningkatnya sistem pelaporan kinerja dan keuangan yang transparan, akuntabel dan informatif		
			Meningkatnya fungsi dokumen perencanaan sebagai acuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD		

Diagram Cascading Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon

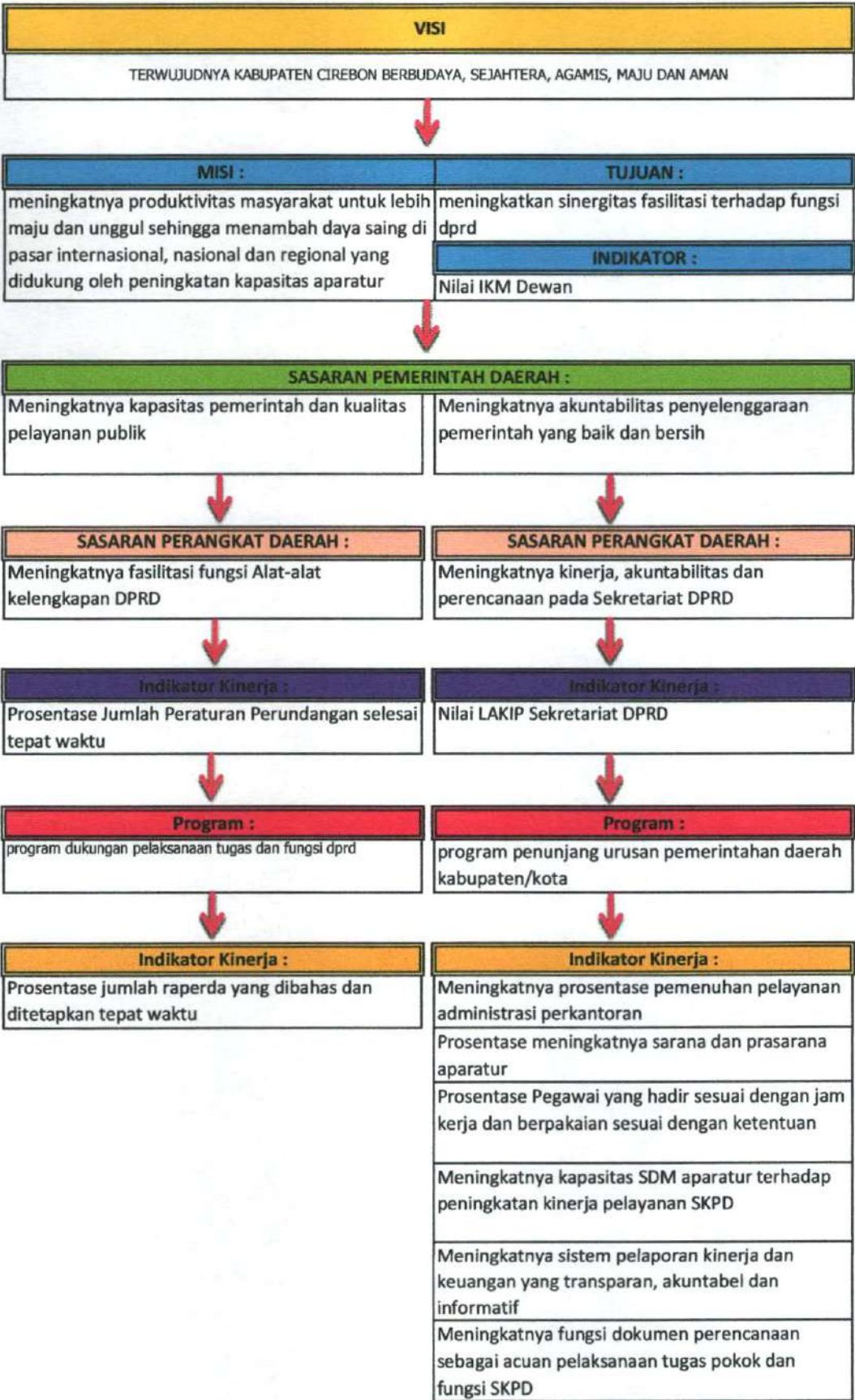


Diagram Crosscutting Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon

